

Forum Freedom 30, 12 Desember 2005

Tema: Terorisme dan HAM

Nara sumber : Anies R. Baswedan

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom...

Hamid Basyaib (HB) :

Selamat pagi saudara, Anda berjumpa lagi dengan saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom, kerjasama anatara Freedom Institute dan Radio 68H yang disebarluaskan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia. Pagi ini tamu saya adalah Dr. Anis Baswedan, selamat pagi Nis!

Dr. Anies Baswedan (AB) :

Selamat pagi.

HB :

Anies adalah Direktur Riset dari The Indonesian Institute yang berkantor di Jalan Thamrin. Pagi ini kita akan membahas "Terorisme dan Hak Asasi Manusia (HAM)". Begini ceritanya, definisi umum terorisme adalah penciptaan dan eksploitasi rasa takut masyarakat luas dengan tujuan untuk menimbulkan perubahan politik. Semua tindakan dianggap teroris jika melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Walaupun itu hanya lewat SMS, itu juga masuk kualifikasi tindakan teroristik. Begitu kira-kira. Nah apakah Anda setuju dengan pemahaman ini? Apa sebetulnya yang dimaksud dengan terorisme? Anda juga cukup mendalami soal ini, walaupun desertasi Anda bukan soal ini.

AB :

Ya, jadi begini, terorisme itu sering kita "we know it when we see it", kita baru tahu ketika itu terjadi. Ketika itu diturunkan dalam bentuk definisi, pengertiannya menjadi bervariasi dan sering menjadi bahan perdebatan, tapi substansinya seperti tadi : menyebarkan rasa takut, ancaman kekerasan, dengan tujuan-tujuan politik. Kalau itu tujuannya kriminal, meskipun bisa dikategorikan terorisme, tapi umumnya kita tidak mengkategorikan politik. Jadi aktivitas-aktivitas politik, tujuan-tujuan politik yang dilakukan dengan cara kekerasan itu bisa dikategorikan sebagai aktivitas teror.

Nah, akhir-akhir ini, kegiatan-kegiatan teroris yang kita lihat itu memiliki warna atau mencerminkan suatu pemahaman-pemahaman ideologi yang ekstrem. Dulu, tahun 1970-an itu marxis dominan di Eropa. Jadi, ada kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berideologi marxis. Misalnya, Red Brigade di Italia, Basque di Spanyol, Baader Meinhof di Jerman. Ada fasenya itu. Sekarang marxis itu sudah agak ditinggalkan. Bukan marxismenya yang ditinggalkan, tapi mereka sudah menemukan format baru dalam mengartikulasikan pemikiran-pemikiran mereka, ide-ide politik mereka tanpa melalui kekerasan. Nah, sekarang kita melihat justru kalangan yang meyakini agama secara ekstrem mengartikulasikan ini dalam bentuk-bentuk aktivitas-aktivitas kekerasan. Ini masuk dalam kategori teror.

HB :

Jadi, Anda mau mengatakan bahwa kalau dulu tahun 1970-an marxisme yang jadi inspirasi dan mereka menerjemahkannya dalam bentuk tindakan-tindakan nyata, dalam hal ini terorisme. Sekarang cara yang sama digunakan bukan oleh kelompok marxisme, tetapi oleh kalangan agama, khususnya Islam dalam hal ini. Itu yang terjadi sebetulnya, jadi cara / metodenya sama.

AB :

Nah, ini yang harus diwaspadai karena ada keengganan bagi kalangan yang pro marxis tahun 1970-an untuk melakukan *kondemnsasi*, mengutuk. Coba Blok Timur, aktivitas-aktivitas Red Brigades di Italia itu mereka juga *hesitant*, enggan untuk melakukan, mengambil jarak, sekarang juga begitu.

HB :

Sekarang begitu, maksudnya apa? Kalau ada terorisme dari kelompok Islam, negeri-negeri Islam sungkan untuk mengecam, mengutuk!

AB :

Kecenderungan untuk enggan memberikan reaksi yang keras terhadap aktivitas kekerasan, dengan berbagai macam justifikasinya. Nah, ini yang mesti hati-hati. Kita harus cerdas dan jeli untuk membedakan *which belong*, yang mana milik agama, milik aktivitas politik, mana yang memanipulasi keduanya, disinilah kita harus hati-hati.

HB :

Anda merasa bahwa itu harus dibedakan dan bisa dibedakan, mana yang kira-kira aspirasi agama murni, mana yang sebetulnya aspirasi politik yang hanya dibungkus oleh agama, begitu maksudnya?

AB :

Ya, saya rasa hal itu dalam banyak aktivitas jelas.

HB:

Tapi kenapa terorisme itu harus dikutuk?

AB :

Karena begini, pertama kita ini umat manusia sudah pada peradaban yang jauh lebih maju, dibandingkan 500 tahun lalu, ketika negosiasi kepentingan dilakukan dengan otot. Sekarang kita sudah pada fase yang jauh lebih beradab. Jadi, kita bisa melakukan negosiasi dengan cara-cara yang lebih beradab pula. Sehingga aktivitas teror atau kekerasan, sebenarnya sudah aktivitas kuno "out of date". Mereka yang melakukan teror itu melambangkan, pertama keputusasaan, kedua jangka pendek, dan ketiga menandakan masih "peradaban lama". Jadi, saya melihat sekarang ini sudah begitu banyak cara untuk mengartikulasikan kepentingan tanpa harus lewat teror.

HB :

Nah, cuma masalahnya para terorisnya sendiri, seperti terungkap kemudian dalam pernyataan-pernyataan mereka, atau pernyataan teror yang muncul sebelum aksi teror aktualnya dilakukan. Biasanya mereka mendasarkan tindakannya pada motif balas dendam atas perlakuan tidak adil yang mereka dapatkan dari yang berkuasa.

AB :

Kita harus membedakan antara menjustifikasi aktivitas teror dan memberikan penjelasan mengapa terjadi aksi teror. Itu dua hal yang berbeda. Di sini, kita harus hati-hati ketika mengatakan, misalnya, ketika Robert Pape mengatakan : "Setiap kenaikan 15.000 tentara Amerika, bertambah satu bom bunuh diri di Irak". Dia bisa mengatakan seperti itu karena angkanya ada. Dari nol (0) tahun 2003 menjadi sekian, saya tidak tahu persis.

HB :

Sebanding dengan penambahan serdadu Amerika?

AB :

Itu penjelasan bukan justifikasi. Ketika kita mengatakan begitu, maka memang ini ada proses interaksi. Nah, proses interaksi seperti ini harus kita perhatikan secara serius, untuk bisa mendapatkan bagaimana aktivitas kekerasan itu dipandang sebagai teror oleh sebagian, dan seringkali dipandang sebagai *hero* oleh sebagian yang lain. Ini dalam konteks Irak. Palestina juga, kurang lebih seperti itu.

Tetapi, ada aktivitas teror yang sulit, tidak bisa dianalisis seperti ini. Misalnya kejadian di Bali dan Jakarta kemarin. Bagaimana kita menjelaskan aktivitas teror tersebut? Setiap kenaikan tentara, apa di sini terjadi teror begitu? Nah, ini berbeda. Kalau dalam kasus Irak jelas, ada pendudukan, ada resistensi, interaksi antara keduanya dalam bentuk kekerasan. Karena pilihan metode berkomunikasi antara dua kelompok kepentingan di wilayah itu adalah menggunakan terminologi *violence*. Tapi kalau memang konteks kita di Indonesia, apa penjelasannya?

HB :

Kalau kita lihat, seperti saya katakan tadi, misalnya pengebom Bali baik seri pertama maupun seri kedua, atau kemudian pengebom Kuningan di depan Kedubes Australia. Mereka kurang lebih mengatakan marah kepada pemerintah Australia, Amerika Serikat, pada Barat pada umumnya, lalu mengebom. Anda masih bingung? Tidak bisa melihat kaitannya? Maksud saya, mereka kan marah pada Australia tapi kemudian ngebomnya Bali.

AB :

Di situlah maka kita kemudian kesulitan untuk memberikan penjelasan atas aktivitas-aktivitas teror ini. Penjelasan seperti Stret Howard pada kasus di Irak yang langsung. Kalau Irak kita mudah untuk memberikan penjelasan. Yang di sini, kita sulit karena kalau kita menganalisis teror itu ada *layer*, lapis-lapisnya. *Pertama*, lapis operasional, *kedua* lapis taktikal, dan *ketiga* lapis strategik itu sendiri. Ada tiga *layer* minimal dari aktivitas teror.

Nah, kita menganalisis pada tingkat operasional menemukan pelaku-pelakunya. Penjelasan-penjelasan adalah penjelasan *cultural ideologis*. Pandangan keagamaan di tingkat ini seperti itu. Di tingkat atasnya, kita masih belum bisa, belum tahu di tingkat taktikal.

Berbeda dengan organisasi-organisasi yang melakukan kekerasan, yang di tingkat taktikal dan strategiknya kita bisa tahu. Misalnya, aktivitas kekerasan di Palestina, itu mudah. Di tingkat operasionalnya kita bisa tahu pelaku-pelakunya, mengapa mereka melakukan itu, kita pun tahu. Di tingkat taktikal kita tahu karena ada organisasi-organisasinya, misalnya Hamas dan Al-Fatah. Di tingkat strategiknya kita juga bisa tahu. Jadi, bisa melihat mereka sebagai satu mesin

operasi yang melakukan kegiatan teror dan kekerasan. Kalaupun sebagian orang tidak mengatakannya sebagai teror.

Kita di sini agak berbeda, karena itu, saya melihat pentingnya kita untuk mengambil sikap yang tegas terhadap terorisme. Publik harus diyakinkan bahwa dalam konteks di Indonesia antara target operasi dan sasaran politik itu tidak nyambung.

HB :

Apalagi para terorisnya (pelakunya) tidak pernah membuat pernyataan bahwa itu tanggungjawab kami. Tidak sebagaimana Brothermanwolf, Red Brigade, tentara merah Jepang, dan Fatah. Di mana-mana mereka biasanya mengklaim bahwa itu perbuatan kami. Di Indonesia ini tidak pernah.

AB :

Karena itu, menimbulkan kecurigaan di tingkat taktikal dan strategiknya, siapa sebenarnya yang melakukan itu? Karenanya saya melihat, kalau ini berbeda dengan Robert Pope yang melakukan analisis tentang *suicide bomber* misalnya, kalau dia melihat kasus begitu kesimpulannya itu bukan *suicide bomber*.

HB :

Bukan bom bunuh diri. Apa kalau bukan bom bunuh diri?

AB :

Ya, orang-orang yang salah jam saja. Artinya kalau saya tanggapi dari semua kasus bom bunuh diri, kalau dia kebetulan mati, itu janjinya diledakan jam 09.30 tapi jam 09.00 sudah meletus bomnya.

HB :

Tanpa si pelaku itu mengetahui? Artinya dia hanya menjalankan perintah bos?

AB :

Dia hanya menjalankan, janjinya setengah sepuluh (09.30) tapi jam 09.00 sudah meletup, akhirnya mati. Bagi kita yang membaca ini, itu adalah *suicide bomber* karena pelakunya meninggal. Tetapi menurut klasifikasi yang melakukan riset tentang *bomber* ada *pattern*-nya. Itu melakukan aktivitas, termasuk klaim pertanggungjawaban, pernah dia sanak saudara, pre press. Ada *pattern* yang sama di seluruh dunia selama 24 tahun terakhir. Itu menurut Robert Pope.

HB :

Robert Pope ini siapa?

AB :

Dia adalah seorang ilmuwan politik dari University of Chicago yang mengkaji masalah bom bunuh diri dan proyeknya itu adalah *reseach project* tentang bom bunuh diri, jadi spesifik betul.

HB :

Kita membicarakan soal Terorisme, Hak Asasi Manusia (HAM), dan bom. Pelaku teror pada umumnya, mereka juga biasa sekali menggunakan dalih-dalih keagamaan, terutama jihad. Seberapa besar kesahihan atau validitas klaim ini menurut Anda?

AB :

Klaim bahwa itu aktivitas jihad, ini problematis. Saya bukan ulama yang ber-*background* syariah untuk menginterpretasikan ini. Tetapi begini, yang saya katakan tadi "level" itu, di tingkat operasional memang jihad ini menjadi motivasi bagi individu yang terlibat, tapi pilihannya itu, bukan jihad. Pemilihan targetnya itu strategis, tidak ada hubungannya dengan jihad. Pilihan-pilihan itu di tingkat individual ada operasional begitu, tapi di tingkat strategis tidak. Makanya kalau kemudian ada penjelasan bahwa itu adalah aktivitas jihad, pertanyaannya mengapa hanya beberapa tempat saja aktivitas itu dilakukan. Ini adalah pilihan strategis yang dikemas dalam kemasan agama.

HB :

Dengan kata lain Anda ingin mengatakan bahwa ini adalah manipulasi atau penyalahgunaan ajaran-ajaran agama?

AB :

Ya, karena ada aktivitas-aktivitas kekerasan yang masuk kategori jihad dan bisa dibenarkan. Misalnya, perlawanan atas pendudukan, jelaslah sebuah tanah diduduki, maka ada perlawanan. Itu mudah mengklasifikasikannya. Seperti kita dijajah Belanda, itu *jihad fii sabilillah*. Tetapi kalau ada orang-orang yang berkumpul, antri untuk mendaftar menjadi pegawai, dan dibom, benarkah itu aktivitas jihad? Pertanyaan fundamental itu muncul.

Meskipun saya bukan seorang *scholar* di bidang syariah tapi saya ingin mengatakan bahwa di sini ada langkah-langkah strategis politis, militeristik, yang dikemas dalam bentuk penjelasan agama. Saya khawatir kalau ini jalan terus dan tidak ada remnya. Kita akan terjebak dalam arus yang menghalalkan kekerasan untuk setiap keinginan apa pun juga. Jadi, kita punya agenda, apa pun itu artinya, kekerasan makin hari makin menjadi pilihan yang menarik.

HB :

Artinya kalau aspirasi saya atau kelompok saya tidak bisa diakomodasi oleh masyarakat luas atau oleh negara, maka saya akan pilih cara kekerasan saja?

AB :

Misalnya, negara mengatakan tidak boleh ada aktivitas judi, lalu tidak ada penegakan hukum. Kemudian masyarakat membuat milisi dan menghantam tempat-tempat perjudian dan didiamkan oleh negara dan masyarakat. Ini berbahaya. Seharusnya aktivitas seperti itu dilakukan oleh negara. Karena negaralah yang memonopoli kekerasan, bukan privat. Kalau terjadi *privatisasi kekerasan* dan didiamkan oleh negara, oleh masyarakat, kita tunggu saja saatnya terjadi *chaos*. Nah, ini di dalam konteks di Indonesia sekarang.

HB :

Jadi kalau hukum tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum, misalnya dalam kasus judi, lalu ada kelompok milisi mengambil alih tugas dan wewenang yang mestinya dilakukan oleh aparat, itu menurut Anda tidak benar? Sebab, maksud saya, para pelakunya menganggap bahwa toh hukum memang tidak ditegakkan oleh aparat penegaknya. Kenapa bukan kami saja yang menegakkan?, itu dalilnya.

AB :

Ya, begini kira-kira kalau gambaran *sheriff* seperti itu. Pakai label *sheriff* maka Anda berhak menegakkan, tapi selama Anda tidak punya label *sheriff* maka Anda tidak punya otoritas di negara, itu berbahaya.

HB :

Artinya kalau pun hukum tidak ditegakkan oleh aparat, tidak boleh ada masyarakat yang mengambil alih?

AB :

Kekerasan diambil alih oleh rakyat ini berbahaya. Mungkin kita dalam jangka pendek mengatakan bersyukur, sekarang tempat-tempat perjudian tutup, tunggu sampai masalahnya bukan perjudian. Sekarang masalah perjudian kebetulan ditentang, nanti kalau masalah lain, perbedaannya isu lain. Kekerasan akan dipakai juga untuk isu buruh, tanah, ada banyak sekali masalah kekerasan. Itu bisa dipakai sebagai instrumen apabila negara tidak menegakkan.

Jadi, menurut saya tekanan yang harus diberikan itu pada negara. Bagaimana institusi negara itu menjalankan aturan-aturan hukum yang sudah ada, tanpa kita intervensi langsung untuk membuat milisi. Front-front kekerasan ini, *pertama* melemahkan peran negara, yang *kedua* menjadi bibit *privatisasi kekerasan*. Nah *privatisasi kekerasan* ini mengerikan sekali.

HB :

Privatisasi kekerasan itu artinya semua orang, individu, kelompok masyarakat bisa menggunakan kekerasan sebagai metode pemecahan masalah. Saya ingat kasus-kasus di Filipina misalnya, kalau orang kaya, politisi, bikin tentaranya sendiri. Atau di Amerika Latin, separah apa keadaan di sana?

AB :

Amerika Latin itu satu contoh bagaimana bekas-bekas organisasi obat-obatan terlarang. Organisasinya eksis dan melakukan aktivitas teror terhadap tuan tanah, kaum kapitalis untuk tujuan-tujuan yang tidak ideologis, tentu ini tidak bisa dikemas dengan kemasan agama. Mereka melakukan aktivitas teror, bukan untuk melawan tujuan-tujuan ideologis, tapi tujuan ekonomis praktis. Kenapa itu semua terjadi? Karena organisasi teror, organisasi kekerasan, muncul akibat adanya privatisasi kekerasan yang didiamkan oleh negara. Ketika aktivitas bisnis barang-barang terlarang ini dihempas, organisasi itu eksis melakukan aktivitas yang lain. Nah, ini bahayanya kalau privatisasi kekerasan itu didiamkan. Begitu privatisasi kekerasan itu didiamkan, maka mendadak di masyarakat kita mempunyai organisasi personal yang memiliki skill-skill untuk melakukan kekerasan dan tindakan terstruktur dalam institusi kekerasan negara. Jadi, tidak ada jalur komando. Orang-orang ini liar dan mereka bisa melakukan apa saja dan ini berbahaya.

Kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, harus ada langkah yang jelas, seperti juga kalau kita ingat negara-negara yang transisi dari pemerintahan otoritarian ke demokrasi. Hampir semua pemerintahan otoritarian itu ditopang oleh intelijen yang kuat. Nah, intelijen itu melakukan operasi kepada rakyat. Dalam konteks Indonesia intelijen tidak terlalu dibenci, karena operasi-operasi kekerasannya dilakukan oleh kalangan yang berseragam. Di Korea Selatan, Iran, Haiti, Filipina, intelijen yang melakukan operasi kekerasan. Begitu mereka transisi ke demokratisasi komponen-komponen intelijen itu masih ada, mereka yang terbiasa melakukan aktivitas teror, menjadi institusi privat. Mereka

melakukan teror -teror sendiri yang merepotkan proses demokratisasi itu. Itulah contoh kasus bagaimana individu-individu atau organisasi yang terbiasa melakukan kekerasan, itu bisa eksis dan membuat institusi negara kacau.

HB :

Dalam jangka panjang, mungkin semua ini berlaku. Artinya itu selesai, mungkin. Tapi itu setelah memakan korban yang begitu banyak, seperti itu?

AB :

Kita tidak perlu menciptakan roda lagi. Kita sudah melihat dari pengalaman negara-negara lain. Mengapa kita menuju arah yang sama dan tidak dihentikan.

HB :

Jadi, kalau boleh diringkaskan, saran Anda apa untuk mengatasi baik yang sudah kelihatan sebagai gejala, sudah kelihatan melakukan privatisasi kekerasan, seperti yang Anda katakan tadi, ada kelompok-kelompok milisi, bukan hanya berdemonstrasi, tapi mau menyerang kantor orang lain, mau menutup, mengusir dan lain sebagainya?

AB :

Kalau saya tidak melihat anjuran moral itu berperan disini. Janganlah, itu tidak bermoral, saya rasa mereka itu rasional kalau *digebuk* keras, mereka tidak akan bergerak. Artinya, kalau mereka melihat ada *disinsentif* yang cukup besar kalau melakukan aktivitas teror, BIN (Badan Intelijen Negara) ngapain melakukan. Tapi, karena tidak ada hukuman, tidak ada respons keras dari negara ketika institusi privat melakukan aktivitas, kekerasan itu akan berlanjut. Jadi, saya melihat negara ini, pemerintah dalam hal ini institusi negara seperti militer dan para penegak hukum harus melakukan langkah yang tegas dalam menghadapi mereka, dan civil society yang lain harus menekan itu. Kalau civil society yang lain membangun milisi tandingan juga untuk menghadapi, sama saja bohong. Mereka saling berkompetisi membangun milisi untuk kepentingan ide-idenya.

HB :

Apa peluang itu jadi besar? Maksud saya kalau aparat keamanannya juga responsnya sangat tidak memuaskan. Ini akan mendorong orang-orang lain membuat kelompok yang sama, walaupun motifnya mungkin membela diri dari serangan milisi lain?

AB :

Itulah yang tadi saya khawatirkan, menyebarnya privatisasi itu, karena dengan sendirinya begitu orang terancam akan mencari bodigat, begitu cari bodigat tidak muncul satu tapi tim, lalu sudah sampai ide bisa banyak lagi. Saya kadang-kadang berfikir mungkin di bangsa kita ini ada komponen *inherent* yang menyukai kekerasan, mungkin bukan hanya bangsa kita tapi bangsa Asia Tenggara.

HB :

Maksud Anda hanya karena apa?

AB :

Coba kita lihat, dalam 40 tahun terakhir di wilayah Asia Tenggara berapa puluh juta orang orang yang meninggal karena kekerasan? Di

wilayah Asia Tenggara, mulai Kamboja, Vietnam, Indonesia, Timor Leste, Ambon, Poso, Sambas dan Aceh luar biasa banyaknya, dan kita belum sampai pada level "outrageous" marah dengan kekerasan. Kalau kita ditunjukkan angkanya kita akan *shock*. Bayangkan, 40 tahun sekian puluh juta orang meninggal, *something is not right* ada sesuatu yang tidak benar disini. Nah, ini yang menurut saya harus disadarkan. Kalau kita toleran pada aktivitas-aktivitas teror privat semacam ini dan teror negara juga, itu pelan-pelan kita akan terbiasa, inilah yang saya katakan tadi, saya khawatir kita sudah terbiasa.

HB :

Ada yang disebut Hanah Arendt "*banalisation of violence*".

AB :

Atau ada juga yang mengatakan aktivitas *democide* bukan democracy. Jadi bagaimana negara itu membasmi, melakukan aktivitas-aktivitas kekerasan.

HB :

Ini berputar-putar bagaimana pun, kuncinya adalah ketegasan negara, khususnya dalam menegakkan hukum, seperti itu?

AB :

Saya melihat begitu, dan ini yang harus, kita konsisten kekerasan itu hanya milik negara, monopoli negara dan dijalankan oleh pemerintah yang dipilih dengan alasan-alasan yang sah oleh rakyat. Karena hati-hati juga, negara itu seperti tadi saya sebut *democide*, itu bisa jadi ketika dikuasai oleh negara kekerasan itu, bahwa tentu itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang netral, karena ketika itu diambil oleh negara, kalau negara ini dikuasai oleh sebagian kelompok atau ada kelompok yang terlalu dominan dan memiliki kepentingan-kepentingan tertentu ini bisa digunakan.

HB :

Baiklah, sayang sekali waktunya habis. Para pendengar sekalian, begitulah Forum Freedom pada pagi kali ini, dan sekali lagi Anda bisa mengontak (021) 70497497. Kita terima kasih kepada Dr. Anis Baswedan dan saya Hamid Basyaib mohon diri.